



PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAKB)
KOTA BATAM TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini ini ditetapkan sebagai proyeksi dini dan arah pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 yang tentunya berpedoman kepada matriks RENSTRA 2021-2026. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, 2 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



NOVI HARMAL YASTU NI, S.Sos
NIP.19761128200212 2 006

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I. PENDAHULUAN	1
--------------------------	---

1.1. Latar Belakang.....	1
--------------------------	---

1.2. Landasan Hukum.....	3
--------------------------	---

1.3. Maksud dan Tujuan	6
------------------------------	---

1.4. Sistematika Penulisan	7
----------------------------------	---

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022.....	9
-----------------	---

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	11
--	----

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
---	----

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	51
--	----

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
---	----

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
--	----

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
---	----

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	74
---	----

3.2. Visi dan Misi Kota Batam	80
-------------------------------------	----

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	81
---	----

3.4. Program dan Kegiatan	82
---------------------------------	----

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	99
---	----

BAB V. PENUTUP	120
----------------------	-----

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparat pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan RENJA ini adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah Batam
- 9) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 15) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 16) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 17) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 18) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
- 21) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 22) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
- 23) Perwako Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan

dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.

- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab III ini berisikan tentang Tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

Pada bab IV ini diuraikan tentang Program, kegiatan, Indikator kinerja, adanya tujuan dan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolak ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak
3. Terkendalinya pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Keempat sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2022 mempedomani Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dituangkan melalui 10 program, 20 Kegiatan dan 35 sub kegiatan

mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 digambarkan capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA DP3APPKB

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2022
Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (LAMA)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (BARU)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	15	16	17=16/15
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Teenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		100%	100%	100%	100%	52%	52%
2.08.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.08.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang		39 Orang	42 Orang	100%	42 Orang	44 Orang	100%

2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Penatausahaa n Keuangan dan Verifikasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	90%	7 Dokumen	5 Dokumen	71%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang teenuhi	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang teenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	79%	79%
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	2 Paket	67%
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	50%

2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2.08.01.2.06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		11 Laporan	7 Laporan	90%	11 Laporan	6 Laporan	54%
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%		100%	100%	100%	100%	54%	54%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%

			yang Disediakan								
2.08.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	N/A								
2.08.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.08.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.08.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	2 Unit	90%	5 Unit	2 Unit	40%
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	100%	60 Unit	0 Unit	0%
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	N/A								
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,4		11.30	13,7	100%	11,3	10,20%	90%
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	75%		65%	90,9	100%	70%	40%	57%

2 08 02 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen		35 Dokumen	44 Dokumen	100%	35 Dokumen	28 Dokumen	80%
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	70%		60%	71%	100%	65%	65%	100%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Persentase perempuan yang dibina	75%		65%	71%	100%	70%	66%	94%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Hebat Politik (seminar kepribadian, lomba hari	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

		ibu, sarasehan organisasi)									
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%		40%	100%	100%	40%	62,50%	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang dilayani oleh unit pelayanan teadu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dokumen		61 Dokumen	65 Dokumen	100%	57 Dokumen	48 Dokumen	84%

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti / dirujuk	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti / dirujuk	30%		30%	55%	100%	30%	16,60%	55%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh unit pelayanan teadu	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan		18 Layanan	33 Layanan	100%	17 Layanan	9 Layanan	53%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A								

2.08.03.2. 03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A								
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,75		4,25%	4,33%	100%	4,50	2,02	45%
2.08.04.2 .01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	75%		65%	77%	100%	70%	60%	86%
2.08.04.2. 01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se Kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%

02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75%		65%	70%	100%	70%	93,54%	100%
2,08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	75%		65%	70%	100%	70%	93,54%	100%
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang difasilitasi pembaharuan data gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen		44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen	22 Dokumen	50%
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800		770 Skor	900 Skor	100%	780 Skor	429 Skor	55%

2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	68%		65%	72%	100%	66%	36,30%	55%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Layanan Anak yang dievaluasi dan diberikan sosialisasi pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	3 Dokumen	60%
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%		100%	100%	100%	100%	20%	20%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti / yang dilayani)	N/A		75%	100%	100%	75%		

2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang dilayani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		95 Dokumen	109 Dokumen	100%	90 Dokumen		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%		65%	100%	100%	65%	50%	77%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang difasilitasi oleh unit pelayanan teadu	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Layanan		62 Layanan	109 Layanan	100%	59 Layanan	30 Layanan	51%

2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	N/A			65%	100%	100%	65%		
2.08.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang difasilitasi oleh unit pelayanan teadu	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		59 SDM	65 SDM	100%	57 SDM			
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50%		30%	100% (21 OPD)	100%	40%	37%	93%	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	50%		30%	47%	100%	40%	25%	63%	

	a Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen grand design yang berbasis kependudukan / Jumlah OPD yang menerima rekomendasi implementasi GDPK	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB	Persentase Balai KB yang memenuhi standar pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100%/40%		100%	83,30%	83%	100%/40%	50%	50%
2.14.02.2.02.03	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Balai KB yang dipenuhi sarana/prasarana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N/A		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		

2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Sistem Informasi Keluarga	N/A	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyellenggara an sistim Informasi Keluarga	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	N/A	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyellenggara an sistim Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	N/A	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 / 9		80,50%/10,0	82.63%/28.28	100%	81.00/9.5	20,3	25%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang	100% / 45%		100%	10 Balai (83.33%)	83%	100% / 40%	25%	25%

			mendapatkan sosialisasi								
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stake Holder dan Mitra kerja	96 Organisasi		N/A			96 Organisasi	96 organisasi	100%
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang mengikuti penyuluhan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

			Kearifan Budaya Loka								
2.14.03.2. 01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Ketersediaan Sarana/Prasar ana KB	N/A								
2.14.03.2. 01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	N/A	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.14.03.2. 01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	N/A	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100%
2.14.03.2. 01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang difasilitasi biaya operasional dipenuhi sarana/prasarana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%

2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan stunting	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%		70%	70%	100%	70%	48%	69%
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang dibina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi		N/A			5 Organisasi	2 organisasi	40%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi yang dibina	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542 Orang		522 Orang	522 Orang	100%	532 Orang	256 orang	48%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat	Presentase Faskes yang memenuhi	Presentase Faskes yang memenuhi	83%		81%	81%	100%	82%	20%	24%

	dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	standard pelayanan KB	standard pelayanan KB								
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		N/A			12 Laporan	6 Laporan	50%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan KB MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600 Orang		550 Orang	550 Orang	100%	575 Orang	1386 orang	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit		N/A			20 Unit	0 unit	0%

2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang difasilitasi penyediaan Alkon dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase kampung KB yang aktif	Presentase kampung KB yang aktif	70%		70%	70%	100%	70%	40%	57%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 Kampung KB		13 Kampung KB	13 Kampung KB	100%	13 Kampung KB	6 Kampung KB	46%

02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55%		45%	45%	100%	55%	25%	45%
2.14.04.2 .01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%		100%	100%	100%	100%	59%	59%
2.14.04.2. 01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	N/A	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	20 Unit		20 Unit	60 Unit	100%	20 Unit	0 unit	0%

2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang Dibina	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	1 Laporan	8%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan stunting	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350 Orang		300 Orang	1632 Orang	100%	350 Orang	207 orang	59%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	N/A			N/A				N/A	

	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan berangsur angsur pulih dari dampak kondisi pandemic Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 s.d. 2021. Mayoritas kegiatan DP3AP2KB yang bersentuhan dengan masyarakat terkait pelayanan telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Kendala yang ditemukan terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik yang realisasi anggarannya belum maksimal berkorelasi dengan petunjuk teknis dari pusat dan pemetaan nomenklatur yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan DAK Fisik BOKB terkait Percepatan Penurunan Stunting masih belum tercapai sesuai target tahun 2022. Sebagai berikut gambaran pelaksanaan pada masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun 2022.

2.2.1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya

dan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga secara umumnya.

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui 77 Tim Penggerak PKK yang dibentuk dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Sepanjang Tahun 2022 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 5100 orang di 12 Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan moril dan spiritual perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini dipandang perlu untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan sesama dalam upaya mencapai keselarasan hidup bermasyarakat dalam keberagaman. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga telah terlaksana HKG PKK melibatkan 450 orang perempuan dan Halal Bi Halal PKK yang melibatkan 300 orang kader PKK se-Kota Batam. Sepanjang Tahun 2022 telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan melalui Pelatihan Kuliner, Pelatihan Tata Rias bagi 10.380 orang perempuan Kota Batam yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam membangun ekonomi kota Batam. Pelatihan ini mencakup Pelatihan Tataboga/Kuliner bagi 1.465 orang, pelatihan

Pengembangan SDM Perempuan 450 Orang, Workshop Usaha Ekonomi Produktif Perempuan bagi 325 orang pelatihan tata rias bagi 450 orang. Dengan metode ini perempuan Kota Batam khususnya ibu rumah tangga ekonomi lemah dapat memiliki daya cipta dan menghasilkan produk yang bernilai jual di pasaran sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Capaian Realisasi Keuangan kegiatan ini 95.17% dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.

2.2.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Melalui program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup perempuan yang berhaluan pada kesetaraan gender dan peningkatan akses publik bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan diberikan pembekalan dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan pembangunan yang turut andil setara dengan kaum laki-laki. Sasaran kegiatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam yang pada tahun 2022 di proyeksikan pada angka IPG 94.44 dan IDG 58.45 dan pencapaian IPG Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 94.51 sedangkan IDG Kota Batam sebesar 58.38. Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan yaitu:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Melalui Kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan cakupan-cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Melalui kegiatan ini terlaksana pelatihan PPRG(GAB/GBS) bagi 50 orang perencana se-kota Batam. Dan capaian Anggaran Responsif Gender tercapai pada angka 13.86% dari total belanja langsung APBD kota Batam. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 69.92% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan Tata Rias bagi 450 orang Ibu rumah tangga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan

kaum perempuan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga sejahtera. Demikian halnya terlaksana Talkshow kesehatan bagi 220 orang perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini dengan tujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan berbangsa dan bermasyarakat. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 94.91%.

2.2.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan basis data gender dan anak yang mengakomodir pelaksanaan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Batam. Dan dilaksanakan melalui kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
Pada tahun 2022 Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97.05 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Muatan kegiatan ini mengakomodir Pelatihan dan Penginputan Data PPRG OPD dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA. Pelatihan dan

Penginputan Data PPRG Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA yang diharapkan memberikan pemahaman perangkat daerah dalam merencanakan penganggaran yang berporos pengarusutamaan gender.

2.2.4. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, maka dipandang sangat perlu untuk memberikan pemahaman tentang Perda perlindungan Perempuan dan Anak ini kepada masyarakat luas. Sering sekali perempuan dan anak menjadi target dan korban kekerasan yang tak jarang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas generasi bangsa yang produktif. Maka melalui kegiatan ini Dinas pemberdayaan Perempuan berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat baik melalui sosialisasi dan penyuluhan agar hak-hak anak dan perempuan dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini juga melibatkan tim P2TP2A dan Tim KPPAD yang sudah terbentuk dan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak. Sampai dengan akhir 2022 terdapat 33 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani dengan baik. Realisasi kegiatan ini telah mengakomodir pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Kota Batam (3x), Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 94.42 dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2.5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2022 diakomodir dari belanja Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) yang secara umum pelaksanaannya sesuai dengan juknis dari kementerian.

Program ini dituangkan dalam 3 kegiatan utama di bawah ini:

- 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2022 kekerasan terhadap anak mencapai 109 kasus. Ini adalah angka yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan layanan khusus dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan pada anak. Alokasi anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar 93.62% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sejumlah persoalan tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena penanganan kasus kekerasan tidak sampai kepada proses medis maupun penanganan medicolegal yang dimuat dalam kerangka anggaran belanja kegiatan ini.

2.2.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2022 telah terbentuk Forum Anak di 12 Kecamatan se-Kota Batam dan 41 Kelurahan dan Demikian halnya KPPAD Kota Batam sebagai komisi pengawas yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Kegiatan ini juga mengakomodir Honorarium KPPAD Kota Batam dan pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak yang pada tahun 2022 mencapai 900 Skor dan meraih peringkat Nindya. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sampai mencapai 100% dengan alokasi anggaran sebesar 95.39%.

2.2.7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mencetuskan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai salah satu program yang terus akan diwujudkan sesuai dengan yang termaktub dalam RPJMD. Dalam capaian program ini diwujudkan

langkah-langkah progresif untuk menekan angka kelahiran penduduk, melaksanakan penyuluhan Keluarga Berencana, dan memberikan pemikiran cerdas terhadap generasi muda Kota Batam tentang bahaya seks bebas, PMS dan HIV/AIDS dan penggunaan obat-obat terlarang(narkoba). Sebagian besar kegiatan dalam program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Program ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Realisasi Keuangan 93.83 % dan capaian fisik 100 % melalui pelaksanaan Pelayanan KB Gratis dan penyuluhan KB di kecamatan dan kelurahan Kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Capaian CPR Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 82.63 %

- b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir media informasi program pembangunan keluarga dan informasi Keluarga Berencana

bagi kader KB dan PIK-Remaja Kota Batam. Realiasi Keuangan sebesar 83.60% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Air, Listrik dan Internet untuk Balai Penyuluhan di 12 kecamatan (bulan januari s.d Mei), penyuluhan bagi kader berbasis data kependudukan pada 12 kecamatan. Realiasi Keuangan sebesar 81.47% dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan ini mengakomodir Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada 12 kecamatan. Dan realisasi keuangan sampai akhir tahun 2022 sebesar 93.53 % dengan capaian fisik sebesar 100 %.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Melalui kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 317 Fasilitas kesehatan KB se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan

jumlah akseptor Aktif KB pada tahun 2022. Realisasi Keuangan sebesar 81.82% dan fisik 100%.

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Realisasi Keuangan sebesar 65.30 % dan fisik sebesar 100 %

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan baik melalui lokakarya mini maupun penyuluhan program keluarga berencana.

Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Realisasi keuangan 82.04 % dan fisik sebesar 100%

2.2.8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

Muatan kegiatan ini berupa pengadaan KIT Siap Nikah Stunting sebanyak 35 Unit dan BKB KIT Stunting sebanyak 25 unit yang diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok Bina Keluarga Balita di Posyandu dan sekolah-sekolah yang memiliki jalur PIK-R (Pusat informasi Konseling Remaja) se-kota Batam dalam upaya mensukseskan program pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera (i bangga). Serapan anggaran kegiatan ini sebesar 98.97% dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi Keuangan 25.03% dan fisik 100 %

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, sampai dengan Tahun 2022 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang menyasar ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan khusus(baik dalam menjahit, memasak, tata rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan produk-produk yang bernilai jual di kalangan masyarakat kota Batam. Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu indikator pencapaian

keluarga sejahtera. Sampai dengan tahun 2022 BKB HI terbentuk 179 kelompok, BKL terbentuk 27 kelompok, dan BKR terbentuk 39 kelompok. Untuk membuka wawasan dan pengetahuan remaja di Kota Batam juga dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja. Kondisi remaja pada masa kini telah memasuki tahap yang memperihatinkan. Terbukanya secara luas sistem jaringan internet telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dewasa ini. Remaja cenderung pasif dan kurang kreatif bahkan kerap kali terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Melalui Pembentukan PIK-R di sekolah-sekolah maupun jalur masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam dengan gencar memaparkan program remaja yang berencana untuk meraih masa depan gemilang yang bebas dari narkoba dan sex bebas. Sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk PIK-R sebanyak 66 kelompok yang diharapkan menjadi pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas berencana dan unggul.

2.2.9. Program Pengendalian Penduduk

Program ini memuat kebijakan daerah dalam sistem kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan kota Batam pada periode 5 tahun RPJMD. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat disusun basis data pembangunan kependudukan yang berhaluan kepada penataan wilayah dan akses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Batam. Program ini diakomodir melalui kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 telah disusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang diharapkan dapat menjadi haluan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Realisasi keuangan sebesar 92.03% dan realisasi fisik 95%.

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Realisasi Keuangan sebesar 89%, dan capaian fisik sebesar 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 TRW II	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,44 %	94,46 %	94,48 %	94,50 %	94,51 %	58,18 %	94,48 %	94,50 %	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			58,45%	58,50 %	58,55 %	58,60 %	58,38 %	49,14 %	58,55 %	58,60 %	
3	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			5,5%	6,0%	6,5%	7,0%	Kasus Meningkat 4.4%	3,1%	6,5%	7,0%	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)			2,36%	2,34%	2,32%	2,30%	2,16%	1,22 %	2,32%	2,30%	
5	Indeks Pembangunan Keluarga			57,24%	57,26 %	57,28 %	57,30 %	55,99 %	28,36 %	57,28 %	57,30 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Masih lemahnya komitmen stakeholder terkait dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis gender
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam
4. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan
5. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
7. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;

8. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
9. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Kode	Rancangan Awal RKPD 2024					Kode	Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	9.334.953.647	02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	10.874.489.532	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8.140.914.287	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9.152.847.922	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	8.093.024.287	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	9.098.597.922	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	7 Dokumen	47.890.000	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	7 Dokumen	54.250.000	

	Keuangan SKPD		ifikasi Keuangan SKPD						ifikasi Keuangan SKPD			
2.08.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	240.736. 000	2.08.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	690.572.250	
2.08.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.000.00 0	2.08.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.994.000	
2.08.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.0 00	2.08.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.750	
2.08.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.538.0 00	2.08.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.730.000	
2.08.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.254.0 00	2.08.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.438.000	
2.08.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.944.0 00	2.08.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.944.000	
2.08.0 1.2.06. 09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat	11 Laporan	165.000. 000	2.08.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat	11 Laporan	617.465.500	

	Konsultasi ke Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.08.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	99.558.000	2.08.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	167.190.000	
2.08.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	99.558.000	2.08.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	167.190.000	
2.08.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	676.755.360	2.08.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	686.889.360	
2.08.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.732.800	2.08.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.726.800	
2.08.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	567.022.560	2.08.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	574.162.560	

2.08.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		176.990.000	2.08.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		176.990.000	
				100%						100%		
2.08.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.060.000	2.08.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79.060.000	
2.08.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	75.350.000	2.08.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	75.350.000	
2.08.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	22.580.000	2.08.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	22.580.000	
02.08. 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA	Kota Batam	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,4	34.860.000	02.08. 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Batam	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,4	86.000.000	

	AN PEREMPUAN											
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	75%	34.860.000	2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	75%	86.000.000	
2 08 02 2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	34.860.000	2 08 02 2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	86.000.000	
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Batam	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	70%	250.000.000	02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Batam	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	70%	5.670.634.000	
2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan	Kota Batam	Persentase perempuan yang dibina	75%	250.000.000	2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase perempuan yang dibina	75%	5.670.634.000	

	Kabupaten/Kota											
2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.670.634.000	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Batam	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	356.064.000	02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Batam	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	471.054.000	
2.08.0 3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	255.040.000	2.08.0 3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	320.000.000	
2.08.0 3.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	57 Dokumen	255.040.000	2.08.0 3.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	57 Dokumen	320.000.000	

	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta			
2.08.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota	Kota Batam	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	101.024. 000	2.08.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	151.054.000	
2.08.0 3.2.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	17 Layanan	101.024. 000	2.08.0 3.2.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	17 Layanan	151.054.000	
02.08. 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Batam	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,75	950.000. 000	02.08. 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Batam	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,75	2.880.520.0 00	

2.08.0 4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	75%	950.000.000	2.08.0 4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	75%	2.880.520.000	
2.08.0 4.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	950.000.000	2.08.0 4.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.880.520.000	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Batam	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75%	67.242.000	02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Batam	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75%	67.239.000	
2,08.0 5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Kota Batam	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	75%	67.242.000	2,08.0 5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Kota Batam	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	75%	67.239.000	

	Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	67.242.000	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	67.239.000	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Batam	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800	320.000.000	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Batam	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800	374.999.900	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	68%	320.000.000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	68%	374.999.900	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Hasil Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	5 Dokumen	320.000.000	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	5 Dokumen	374.999.900	

			Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota			
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Batam	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	110.960.000	02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Batam	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	146.388.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	110.960.000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	146.388.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Layanan	110.960.000	2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	146.388.000	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Batam	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50%	315.800.000	02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Batam	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50%	315.800.000	

2.14.0 2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Batam	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	50%	50.000.000	2.14.0 2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Batam	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	50%	50.000.000	
2.14.0 2.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	2.14.0 2.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.14.0 2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100%/40%	265.800.000	2.14.0 2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100%/40%	265.800.000	

2.14.0 2.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	64.200.000,00	2.14.0 2.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	64.200.000,00	
2.14.0 2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	129.600.000,00	2.14.0 2.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	129.600.000,00	
2.14.0 2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	72.000.000	2.14.0 2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	72.000.000	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Batam	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 / 9	4.002.220.000	02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Batam	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 / 9	5.483.957.648	
2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 45%	834.600.000	2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 45%	1.086.634.648	

2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.0 00	2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000	
2.14.0 3.2.01. 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	318.600. 000	2.14.0 3.2.01. 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	318.600.000	
2.14.0 3.2.01. 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	1 Laporan	156.000. 000	2.14.0 3.2.01. 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	1 Laporan	156.000.000	

			Lokakarya (Minilok)						Lokakarya (Minilok)			
2.14.0 3.2.01. 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000	2.14.0 3.2.01. 12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000	
2.14.0 3.2.01. 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	50.000.000	2.14.0 3.2.01. 13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	302.034.648	

			yang dilaksanakan						yang dilaksanakan			
2.14.0 3.2.01.01	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organisasi	80.000.000	2.14.0 3.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organisasi	80.000.000	
2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Punyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Batam	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	240.000.000	2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Punyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Batam	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	240.000.000	
2.14.0 3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542 Orang	128.000.000	2.14.0 3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542 Orang	128.000.000	

2.14.0 3.2.02. 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	112.000.000	2.14.0 3.2.02. 05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	112.000.000	
2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	83%	2.717.120.000	2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	83%	3.946.823.000	
2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	12 Laporan	140.400.000	2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	12 Laporan	140.400.000	

	Jaringan dan Jejaringnya		Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
2.14.0 3.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600 Orang	1.550.000.000	2.14.0 3.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600 Orang	2.779.703.000	
2.14.0 3.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	957.420.000	2.14.0 3.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	957.420.000	
2.14.0 3.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	69.300.000	2.14.0 3.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	69.300.000	
2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Kota Batam	Presentase kampung KB yang aktif	70%	210.500.000	2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Kota Batam	Presentase kampung KB yang aktif	70%	210.500.000	

	Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2.14.0 3.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Batam	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 Kampung KB	210.500.000	2.14.0 3.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Batam	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung KB	210.500.000	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Batam	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55%	3.191.608.507	02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Batam	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55%	3.922.200.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Batam	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	3.191.608.507	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Batam	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	3.922.200.000	

2.14.0 4.2.01. 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL ,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	20 Unit	360.000.000,00	2.14.0 4.2.01. 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	360.000.000,00	
2.14.0 4.2.01. 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	12 Laporan	75.000.000	2.14.0 4.2.01. 21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KA)	12 Laporan	135.000.000	

2.14.0 4.2.01. 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Kota Batam	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	350 Orang	2.756.60 8.507	2.14.0 4.2.01. 24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	3.427.200.0 00	
TOTAL					18.933.70 8.154						30.293.282.0 80	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembinaan keluarga Berencana	Kelurahan Muka Kuning	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Orang	Operasional Kader Pelayanan KB (Bantuan Transport)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN

3.1.1.1. Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 yang berperdoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);

- b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni);
- c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja;
- d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

3.1.1.2. Renstra BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi “Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”,

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2020-2024 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara

komprehensif, 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup, 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan edukasi serta 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Adapun tujuan yang ingin di capai selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu : 1) mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia serta 2) mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Dalam hal ini BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan bahagia batin. Serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,

BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping

penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang tertera pada Renstra BKKBN 2020-2024 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

3. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi/ Unmeet Need
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Perkawinan Pertama (MUKP)

3.2. VISI DAN MISI KOTA BATAM

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, **Visi Kota Batam** adalah **”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”** dan **Misi** yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.”**

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3.1. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Tujuan:

“Meningkatkan Kesenjangan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”

3.3.2. SASARAN

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

- 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam**
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**
- 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk**
- 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga**

Dengan indikator kinerja utama:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Angka Kelahiran Total (TFR)
4. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 :

Table T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024, Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (RENSTRA 2021-2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	100%	10.874.489.532			100%	9.709.054.687
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	9.152.847.922			100%	8.453.704.287
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	9.098.597.922	PENDAPATAN ASLI DAERAH		44 Orang	8.393.024.287
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	7 Dokumen	54.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		7 Dokumen	60.680.000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

	kasi Keuangan SKPD								
2.08.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	690.572.250			100%	285.000.000
2.08.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	7.994.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Paket	10.000.000
2.08.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	25.000.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 Paket	40.000.000
2.08.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Paket	22.000.000
2.08.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	17.438.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 Paket	18.000.000
2.08.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	15.944.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 Paket	15.000.000
2.08.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	11 Laporan	617.465.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Laporan	180.000.000
2.08.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terlaksana	Kota Batam	100%	167.190.000			100%	120.000.000

2.08.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	167.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Unit	120.000.000
2.08.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Batam	100%	686.889.360			100%	673.290.400
2.08.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	112.726.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	110.000.000
2.08.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	574.162.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 laporan	563.290.400
2.08.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	176.990.000			100%	177.060.000
2.08.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 Unit	79.060.000
2.08.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	75.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Unit	76.000.000

	Dinas Operasional atau Lapangan								
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	22.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		60 Unit	22.000.000
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Kota Batam	11,4	86.000.000			11,50	80.000.000
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Kota Batam	75%	86.000.000			80%	80.000.000
2 08 02 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	86.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		35 Dokumen	80.000.000
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Kota Batam	70%	5.670.634.000			75%	465.000.000

2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Kota Batam	75%	5.670.634.000			80%	465.000.000
2.08.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	5.670.634.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2 Dokumen	465.000.000
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Kota Batam	100%	471.054.000			100%	395.000.000
2.08.0 3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Batam	40%	320.000.000			40%	285.000.000
2.08.0 3.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	320.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		55 Dokumen	285.000.000

2.08.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Kota Batam	30%	151.054.000			30%	110.000.000
2.08.0 3.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	17 Layanan	151.054.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		17 Layanan	110.000.000
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Kota Batam	4,75	2.880.520.000			5,0	875.000.000
2.08.0 4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Kota Batam	75%	2.880.520.000			80%	875.000.000

2.08.0 4.2.01. 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2.880.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Laporan	875.000.000
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan kebijakan PUG	Kota Batam	75%	67.239.000		80%	190.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Kota Batam	75%	67.239.000		80%	190.000.000
2.08.0 5.2.01. 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	67.239.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44 Dokumen	190.000.000
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Batam	800	374.999.900		820	350.000.000

2.08.0 6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Kota Batam	68%	374.999.900			70%	350.000.000
2.08.0 6.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	374.999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Dokumen	350.000.000
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Kota Batam	100%	146.388.000			100%	220.000.000
2.08.0 7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti/yang dilayani)	-	-	-			75%	60.000.000
2.08.0 7.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-			80 Dokumen	60.000.000

2.08.0 7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	146.388.000			65,00%	160.000.000
2.08.0 7.2.02. 05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Batam	55 Orang	146.388.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		52 Orang	160.000.000
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Kota Batam	50%	315.800.000			60%	320.800.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Kota Batam	50%	50.000.000			60%	55.000.000

2.14.0 2.2.01. 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	55.000.000
2.14.0 2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100%/ 40%	265.800.000			100% / 50%	265.800.000
2.14.0 2.2.02. 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	64.200.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		12 Laporan	64.200.000
2.14.0 2.2.02. 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	129.600.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		1 Laporan	129.600.000
2.14.0 2.2.02. 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	12 Dokumen	72.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		12 Dokumen	72.000.000
02.14. 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Kota Batam	82.00 / 9	5.483.957.648			83,00 / 8,5	4.855.800.000

2.14.0 3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100% / 45%	1.086.634.648			100% / 50%	1.903.784.000
2.14.0 3.2.01. 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Unit	215.000.000
2.14.0 3.2.01. 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		1 Laporan	80.000.000
2.14.0 3.2.01. 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	318.600.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB		1 Laporan	872.784.000

2.14.0 3.2.01. 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	156.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		1 Laporan	156.000.000
2.14.0 3.2.01. 12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	1 Dokumen	150.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		1 Dokumen	150.000.000
2.14.0 3.2.01. 13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	302.034.648	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 Dokumen	350.000.000

2.14.0 3.2.01. 14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	96 Organisasi	80.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		96 Organisasi	80.000.000
2.14.0 3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Punyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Kota Batam	70%	240.000.000			70%	507.200.000
2.14.0 3.2.02. 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	542 Orang	128.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		552 Orang	307.200.000
2.14.0 3.2.02. 05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	5 Organisasi	112.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS		5 Organisasi	200.000.000
2.14.0 3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	Kota Batam	83%	3.946.823.000			84%	1.844.144.000

	Kabupaten/Kota								
2.14.0 3.2.03. 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	140.400.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB		12 Laporan	198.475.000
2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	2.779.703.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB		625 Orang	591.369.000
2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	957.420.000	DAK Fisik BKOB		20 Unit	985.000.000
2.14.0 3.2.03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	1 Laporan	69.300.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB		1 Laporan	69.300.000

2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Kota Batam	70%	210.500.000			70%	600.672.000
2.14.0 3.2.04. 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Batam	12 Kampung KB	210.500.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB		13 Kampung KB	600.672.000
02.14. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Kota Batam	55%	3.922.200.000			60%	2.915.910.119
2.14.0 4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Kota Batam	100%	3.922.200.000			100%	2.915.910.119

2.14.0 4.2.01. 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	360.000.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	20 Unit	360.000.000
2.14.0 4.2.01. 21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12 Laporan	65.101.612
2.14.0 4.2.01. 24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3.427.200.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	350 Orang	2.490.808.507

	Keluarga Akseptor (UPPKA)								
TOTAL				30.293.282.080				20.376.564.806	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

9. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program yang mendukung isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026 terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kapasitas SDM perempuan kota Batam.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup

keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses, kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

Tabel: 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024:

Program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa indikator kegiatan yang tertera pada Tabel 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	100%	10.874.489.532		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	9.152.847.922		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	44 Orang	9.098.597.922	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	7 Dokumen	54.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	690.572.250		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	7.994.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	25.000.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	17.438.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	15.944.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	11 Laporan	617.465.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	167.190.000		
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	5 Unit	167.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kota Batam	100%	686.889.360		

2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	112.726.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	574.162.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	176.990.000		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	75.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	60 Unit	22.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Kota Batam	11,4	86.000.000		
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Kota Batam	75%	86.000.000		

2 08 02 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	86.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Kota Batam	70%	5.670.634.000		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Kota Batam	75%	5.670.634.000		
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	5.670.634.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Kota Batam	100%	471.054.000		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Batam	40%	320.000.000		

2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	320.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti / dirujuk	Kota Batam	30%	151.054.000		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	17 Layanan	151.054.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Kota Batam	4,75	2.880.520.000		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Kota Batam	75%	2.880.520.000		

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Laporan	2.880.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Kota Batam	75%	67.239.000		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Kota Batam	75%	67.239.000		
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	67.239.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Batam	800	374.999.900		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Kota Batam	68%	374.999.900		

2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	374.999.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Kota Batam	100%	146.388.000		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Kota Batam	65%	146.388.000		
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Batam	55 Orang	146.388.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Kota Batam	50%	315.800.000		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Kota Batam	50%	50.000.000		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100%/ 40%	265.800.000		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	64.200.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	1 Laporan	129.600.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Batam	12 Dokumen	72.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Kota Batam	82.00 / 9	5.483.957.648		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Kota Batam	100% / 45%	1.086.634.648		

2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	1 Laporan	80.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	1 Laporan	318.600.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB	
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	1 Laporan	156.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	1 Dokumen	150.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	

2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	302.034.648	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	96 Organisasi	80.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Punyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Kota Batam	70%	240.000.000		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	542 Orang	128.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	5 Organisasi	112.000.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	Kota Batam	83%	3.946.823.000		

2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	140.400.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	600 Orang	2.779.703.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	20 Unit	957.420.000	DAK Fisik BKOB	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	1 Laporan	69.300.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Kota Batam	70%	210.500.000		

2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Batam	12 Kampung KB	210.500.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KB	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Kota Batam	55%	3.922.200.000		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Kota Batam	100%	3.922.200.000		
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	360.000.000,00	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	350 Orang	3.427.200.000	DAK Non Fisik BKOB Bidang KS	
TOTAL					30.293.282.080		

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 10 (sepuluh) program yang telah dispesifikasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Dengan pelaksanaan kesepuluh program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan ***“Meningkatkan Kesenjangan Gender serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Menuju Keluarga yang Mandiri”*** serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam periode Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat ***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”***

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam


NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KOTA BATAM

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.III Batam Center; Telp/Fax. (0778) 470692 Batam
Email: bppakbbatam@gmail.com

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor: 062/RP.01.01/XII/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BATAM
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

Batam Tahun 2022 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 30 Desember
2022

KEPALA DINAS



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos

NIP. 19761128 200212 2 006

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) DP3APKB KOTA BATAM TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
TAHUN 2023**

NO	JABATAN			JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM			SEKRETARIS
I.	PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ROYHANDY RIFANTO, S.Kom	19840830 201001 1 003	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	FERA DARMAYANTI, S.IP	19870211 201101 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

3	NURUL YUNI, S.H	19740626 200212 2 005	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
4	Dra. TUTI ARYANTI	19740704 200003 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Anggota
II.	PEMENUHAN HAK ANAK			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAFEAH, S.Sos	19730115 200003 2 001	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
2	SRI YANTI, S.E, M.Si	19750210 200003 2 006	Kasi PHA di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota
3	SRI RAHMI FITRIANTY, S.E	19691210 200212 2 008	Kasi PHA di Bidang Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	ULFI RAMAYANTI, S.ST	19680611 198801 2 003	Kasi PHA di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM

1	FISCA ANGGIANA, S.E	19710714 200003 2 007	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	DEDY SURYADI, AKS, M.H	19670929 198803 1 009	Kasi Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	HASRIATI, S.E	19741027 200901 2 004	Kasi Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
4	TEDDY SUHANDI, S.IP	19810610 200801 1 011	Kasi Perlindungan Anak	Anggota
IV.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUTIARA AYU, S.IP	19870814 200701 2 002	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Ir. INDAWATY WAKIDJO	19671102 199403 2 005	Kasi Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	LIBERTY LUCI PATIMANG, S.KM	19711216 199803 2 008	Kasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
V.	KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. DEWI MURNI	19751225 200604 2 029	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024

2	TIAMAN SITORUS, S.E	19650822 198602 2 006	Kasi Bina Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga	Anggota
3	ISNAINI, S.Ag	19660319 199803 2 002	Kasi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Anggota

Batam, 30 Desember 2022

KAPALA DINAS



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006